

# DODOTO

## JURNAL PENDIDIKAN

MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS ICT

Drs. Ishak Djamaluddin, M.Pd

AN ANALYSIS OF TEST RESULT

Nurlaily Sofyan, S. Pd, M, Hum

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN OTONOMI SEKOLAH DI ERA GLOBALISASI

(Studi Kasus di Provinsi Maluku Utara)

Barak Djibat, S.Ag.,M.Pd

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS *E-LEARNING*

Sudarto M.Abukasim, M.Pd

PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI PENERAPAN METODE PEMBERIAN  
TUGAS KELOMPOK

(Studi Kasus Pada Siswa Kelas IX-A SMP Muhammadiyah 1 Kota Ternate Pada  
Mata Pelajaran Bahasa Inggris Materi Procedure)

Endan f Hermanto Y Hermanto,S.Pd, M.PdI

UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR IMAN PADA HARI AKHIR MELALUI

SHARIN DAN MEDIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS IX A SMP MUHAMMADIYAH I TERNATE

Mahani Assagaf, S.Pd.I



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

# **PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN OTONOMI SEKOLAH DI ERA GLOBALISASI (Studi Kasus di Provinsi Maluku Utara)**

Oleh: Bakar Djibat

## **ABSTRAK**

*Pendidikan yang berkualitas hanya akan diraih dari sekolah yang berkualitas. Sekolah yang berkualitas hanya akan tercipta berdasarkan keterlibatan oleh berbagai pihak (pemerintah dan masyarakat), namun disisi lain banyak pihak yang merasa keberatan untuk mengeluarkan dana sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Kualitas pendidikan sebagaimana kita harapkan sangat ditentukan oleh tingkat pembiayaan yang dikucurkan. Guna menghasilkan pendidikan yang berkualitas diperlukan biaya yang tidak sedikit dan penggunaannya harus secara transparan dan akuntabel. Itulah sebabnya iklim pendidikan di provinsi Maluku Utara berada dalam dua spirit yang bertolak belakang, yaitu konsep otonomi dan globalisasi. Betapa tidak, konsep otonomi menunjukkan pada keadaan serba terbatas yang justru tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang berkualitas yang menjadi asa kita semua. Sedangkan konsep globalisasi menunjukkan pada keadaan serba tersedia dan merayu untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas guna memenangkan persaingan global. Kenyataan demikian memerlukan kecerdasan dan ketelatenan manajemen pendidikan sehingga menghasilkan kebijakan pendidikan yang membumi.*

**Kata kunci:** Pembiayaan, otonomi, globalisasi

## **A. PENDAHULUAN**

Globalisasi, terkadang merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dihindari lagi oleh kita semua, karena itu suatu negara atau suatu daerah haruslah memiliki kebijakan yang tepat untuk menghadapi dan memenangkan kompetisi yang terus mengglobal. Itulah sebabnya suatu negara atau daerah haruslah mampu menciptakan sumber daya manusia yang handal, unggul dan berkualitas dengan tidak menafikan kekhasan daerahnya (kearifan lokal). Harus diakui, penciptaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan melalui dunia pendidikan. Kesalahan dalam menetapkan kebijakan pada dunia pendidikan akan mengakibatkan keterpurukan suatu negara atau daerah dalam menghadapi persaingan. Trend permasalahan yang dihadapi di Indonesia dewasa ini berupa dua hal yang sangat bertolak belakang, yaitu berupa otonomi yang lebih kental bernuansa kedaerahan (lokal) dan globalisasi yang lebih kental bernuansa mendunia. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana konsekuensi pembiayaan pendidikan di provinsi Maluku Utara pada era otonomi dan globalisasi yang memiliki semangat bertolak belakang dan saling beradu kepentingan.

## **B. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI PROVINSI MALUKU UTARA**

Di provinsi Maluku Utara, pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang sangat penting dan terus menjadi bahan perdebatan dan diskusi hampir disemua kalangan masyarakat karena terkait dengan keseluruhan pembangunan sistem pendidikan. Uang, menurut Slamet (2014) memang bukan segala-galanya dalam menentukan kualitas pendidikan tapi harus jadi nomor satu, karena tanpa uang segala-galanya tidak akan bisa berjalan, termasuk pendidikan, maka sangatlah naif ada pihak yang menawarkan pendidikan gratis. Semua kegiatan pendidikan memerlukan uang. Oleh karena itu jika keadaan sistem pendidikan termasuk implementasi kurikulum di daerah ini diperbaiki, manajemen penganggarannya juga diperbaiki, kesadaran masyarakat juga terus ditingkatkan, maka hampir bisa dipastikan keadaan pendidikan di Maluku Utara lambat laun akan berubah. mengingat tidak semua masyarakat di provinsi Maluku Utara sepenuhnya menyadari bahwa biaya pendidikan yang cukup akan dapat mengatasi berbagai masalah pendidikan, meskipun tidak semua masalah akan dapat dipecahkan secara tuntas (Nanang Fattah, 2004: 67).

Bagi provinsi Maluku Utara sudah menjadi sesuatu yang lumrah, bahwa biaya pendidikan bukanlah merupakan sesuatu yang baru, akan tetapi dalam momen-momen tertentu masih merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan, terutama pada tahun pelajaran baru. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah negeri yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) akan berjalan (Supriadi, 2006:3).

Menurut peneliti, istilah biaya pendidikan sering kali disamakan dengan pengeluaran pada pendidikan. Namun biaya pendidikan dalam penelitian ini memiliki pengertian yang luas, yaitu semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga yang bagi orang Maluku Utara sejak dahulu dan secara turun-temurun sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Biaya yang dimaksud mengacu ke total biaya termasuk kesempatan mengakses pendidikan yang digunakan untuk perencanaan jangka panjang. Sedangkan pengeluaran menunjukkan pada pembelian barang dan jasa, bangunan sekolah, perlengkapan sarana prasarana dan lainnya. Adapun biaya pribadi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh siswa yang bersumber dari orang tua yang berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dalam hubungan ini menurut Latchanna dan Hussein, (2007:51 - 52), Sebagaimana dikutip Woodhall (2004: 29), pengeluaran uang hanya berarti karena pengeluaran menggambarkan pengupahan tenaga pengajar, bangunan sekolah dan peralatan atau barang-

barang dan jasa lainnya yang memiliki alternatif dan kejelasan dalam penggunaannya. Itulah sebabnya dapat dikatakan konsep biaya pendidikan ini dapat dibedakan dengan cara mengelompokkan biaya yang keluar, yaitu (1) *social and private cost*, (2) *opportunity cost and money cost*, and (3) *explicit and implicit costs* (Latchanna dan Hussein, 2007: 52 - 56). Sedangkan menurut Thomas (1972) yang dilegitimasi oleh Anwar, (1991), dan Gaffar, (1991) menyatakan bahwa dalam dunia pendidikan dikenal beberapa kategori biaya pendidikan yaitu (1) biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*), (2) biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*), dan (3) biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-menetary cost*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kategori pembiayaan pendidikan sebagaimana dikatakan oleh para ahli diatas, semuanya dapat ditemukan ditengah masyarakat Maluku Utara dengan prosentase yang berbeda-beda. Sehingga dalam kenyataannya pengkategorian biaya pendidikan tersebut terkesan tumpang tindih, misalnya ada biaya pribadi dan sosial yang bersifat langsung dan tidak langsung serta berupa uang dan bukan uang (barang), dan ada juga biaya langsung dan tidak langsung serta biaya pribadi dan biaya sosial yang dalam bentuk uang maupun bukan uang (barang). Jenis biaya yang terakhir ini dialami oleh peneliti sendiri sewaktu sekolah di SD pada tahun 1976 – 1982 di salah satu SD di pulau Makian (sekarang wilayah kab. Halmahera Selatan) provinsi Maluku Utara. Yang terjadi sekarang ini, pengeluaran biaya sekolah berupa pembayaran uang sekolah (komite/SPP, DPP, praktikum), lebih-lebih di sekolah swasta biasanya dipergunakan untuk pembelian berbagai macam sumberdaya atau masukan (*input*), operasional sekolah seperti mengurus tenaga administrasi, guru-guru, bahan-bahan, perlengkapan-perengkapan dan fasilitas lainnya. Artinya biaya ini harus menggambarkan nilai seluruh sumberdaya yang digunakan dalam operasional sekolah apakah terdapat dalam RAPBS dan pengeluaran atau tidak. Dengan demikian biaya yang bersumber dari sekolah termasuk nilai setiap input yang digunakan, meskipun sekolah memberikan sumbangan atau tidak terlihat secara akurat dalam perhitungan pengeluaran (Levin and Hans, 1987:426).

Selain dari itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam upaya perbaikan mutu pendidikan di provinsi Maluku Utara pada tingkat satuan pendidikan (sekolah) atau mutu pendidikan secara keseluruhan, ditemukan hanya segelintir masyarakat yang pemahamannya cukup mendalam terhadap berbagai aspek pembiayaan pendidikan. Padahal pemahaman terhadap biaya diberbagai aspek pendidikan amat penting diperhatikan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pemahaman masyarakat terhadap biaya diberbagai aspek pendidikan tersebut tidak hanya pada tingkat satuan pendidikan atau tingkat mikro akan tetapi harus bersifat nasional bahkan internasional, antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, dan akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tataran, khususnya

tingkat sekolah, Suharsimi Arikunto,( 2004: 7). Menurut Nanang Fattah (2004: 134), paradigma umum pembiayaan pendidikan menekankan pada penyelesaian biaya rendah untuk meningkatkan efisiensi internal dan efisiensi eksternal sistem pendidikan pada jenjang sekolah yang berbeda. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa keterkaitan antara efisiensi internal dan eksternal sekolah untuk sekolah dasar dan sekolah menengah dapat ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel. Keterkaitan antara Efisiensi Internal dan Eksternal Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah di Provinsi Maluku Utara

<i>School Level Efficiency of Schooling</i>	<i>Internal Efficiency</i>	<i>External Efficiency</i>
<i>Basic Education</i>	<i>High Pass rates, Drop-out Prevention</i>	<i>Good Citizenship Literacy/Numeracy</i>
<i>Secondary Education and Above</i>	<i>Cost effective Approaches to Service Delivery of education</i>	<i>Market-based skill Wage Employment On-job training</i>

(Loxley, 2004: 144, telah diolah).

Itulah sebabnya jika diperhatikan dengan seksama, biaya pendidikan atau pengeluaran sekolah di provinsi Maluku Utara sangat ditentukan oleh komponen-komponen biaya pendidikan yang jumlah dan porsinya berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Berdasarkan pendekatan unsur biaya (*ingredient approach*), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran yang berupa (a) pengeluaran untuk pelaksanaan pembelajaran, (b) pengeluaran untuk tata usaha sekolah, (c) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, (d) kesejahteraan guru dan pegawai, (e) administrasi, (f) pembinaan teknis edukatif, dan (g) pendataan (Fattah, 2002: 24). Secara lebih rinci pemanfaatan biaya pendidikan di sekolah digunakan untuk berbagai komponen yang berupa (1) gaji/kesejahteraan pegawai (termasuk guru), (2) pembinaan profesi guru, (3) pengadaan alat-alat pelajaran, (4) pengadaan buku pelajaran, (5) perawatan/rehabilitasi gedung ruang belajar, (6) pengadaan mobiler kelas, (7) pengadaan sarana sekolah, (8) pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, dan (9) pengelolaan sekolah (Fattah, 2002:109).

Di provinsi Maluku Utara, pengeluaran biaya pendidikan di atas terlihat bahwa secara keseluruhan merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh sekolah. Disisi lain, terdapat juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh siswa atau keluarganya berkaitan dengan kegiatan sekolah. Oleh karena itu pemanfaatan biaya pendidikan yang terjadi pada seorang siswa berkaitan dengan kegiatan sekolah dapat berupa (1) uang pangkal/uang masuk, (2) iuran rutin sekolah (komite), (3) ulangan, (4) kegiatan ekstra-kurikuler, (5) praktikum dan praktek, (6) buku pelajaran/latihan/LKS, (7) buku dan alat-alat tulis, (8) tas sekolah, (9) sepatu sekolah, (10) transportasi ke sekolah, (11) pakaian seragam

sekolah, (12) pakaian olah raga, (13) pakaian batik (14) les di sekolah oleh guru, (15) kursus/les di luar sekolah, (16) karya wisata, (17) sumbangan insidental berupa biaya pengisian raport, (17) uang saku/jajan siswa, dan (18) biaya lainnya (Supriadi, 2006:192).

Dalam konsep pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan *aggregate* biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per siswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan (Fattah, 2002).

### **C. OTONOMI PENDIDIKAN**

Lahirnya otonomi daerah yang ikut melahirkan pula otonomi pendidikan didasarkan pada pola pemikiran yang sangat baik, yaitu untuk menumbuhkembangkan inisiatif dan kreatifitas ditingkat daerah dan khususnya sekolah. itulah sebabnya Pemerintah Daerah (Pemda) bisa berwenang mengatasi kekurangan guru, memiliki anggaran yang memadai untuk pengadaan buku, bahkan daerah juga berani meningkatkan kesejahteraan guru. Disamping itu sekolah juga memiliki keleluasaan untuk meningkatkan mutu guru, dan masih banyak pemikiran yang mendasari munculnya otonomi pendidikan (sekolah), Tilaar (1998 :201). Namun satu hal yang perlu dipahami bahwa untuk membuat kebijakan penetapan biaya pendidikan yang selaras dengan kearifan lokal bukan merupakan hal yang mudah dilakukan, Suyanto (2001 :87). Daerah dan sekolah sangat memerlukan tenaga yang sesuai kebutuhan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan sekolah (daerah). Selama ini sumber daya manusia yang ada sudah terbiasa melakukan kegiatan yang bersifat rutin. Sistem pendidikan atau yang lebih khusus menyangkut pola-pola kebijakan biaya pendidikan yang diterapkan di negara berkembang termasuk Indonesia dan yang lebih khusus di provinsi Maluku Utara, hampir memiliki keadaan yang sama, yakni fleksibilitas, Fauzan (1999 :112). Di republik tercinta ini, bukti fleksibilitas terlukis dalam slogan sinis "*ganti menteri ganti kebijakan*". Sementara di provinsi Maluku Utara, "*Jika gubernurnya masih itu dan personil di Dinas Pendidikan provinsi juga masih itu, jangan berharap ada perubahan kearah perbaikan*". Malut Post (16 Agustus 2007). Dalam hal ini, yang tampak adalah intensitas perubahan yang mengikuti periodisasi jabatan menteri dan sang gubernur pada saat kampanye. Ironisnya, kadang-kadang orientasi perubahan itu hanya bersifat *lift service* dan sensasional yang sangat atributif dan kurang menyentuh dimensi substansial pendidikan.

Memang harus diakui di Maluku Utara, bahwa otonomi daerah telah dicoba untuk dijadikan landasan kebijakan pendidikan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan

program pemerataan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan relevansi. Fattah, (2004 :47). Hal ini dilatarbelakangi adanya realitas bahwa ketika pemerataan pendidikan dihentikan, maka banyak anak usia sekolah yang tidak tersentuh oleh hiruk-pikuk pendidikan. Pemerataan yang dimaksud antara lain memberikan kesempatan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan. Beberapa tahun terakhir ini pemerintah meluncurkan program beasiswa "*Bidik Misi*" yang juga berlaku di Perguruan Tinggi (PT) yang diperuntukkan untuk para lulusan SLTA yang tidak mampu melanjutkan kuliah dengan ketiadaan biaya yang harus dibuktikan beberapa persyaratan yang cukup sampai dengan foto rumah orang tua, (memang harus benar-benar miskin). Selain itu, pemberian bantuan yang berupa seragam sekolah dan beasiswa juga di SLTA kebawah, pembebasan DPP dan iuran Komite kepada anak dari keluarga kurang dan tidak mampu, merupakan upaya untuk meningkatkan semangat belajar siswa dan membantu meringankan beban orang tua siswa. Bahkan ada kabupaten tertentu di Maluku Utara yang menggulirkan program pendidikan gratis (katanya begitu).

Menurut Suryadi (2003: 195), pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Itulah sebabnya bagi Sudarwan Danim (2010: 115) bahwa kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Beliau mengatakan setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu : 1) Peningkatan Mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki; 2) Efisiensi Keuangan, hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan lokal dan mengurangi biaya operasional; 3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang kaku dengan menghilangkan prosedur yang berbelit-belit; 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan. Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuat landasan pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat di daerah. Muchtar Buchori (2001) menyatakan pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan, karena pendidikan berfungsi sebagai pengembang pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan. Melalui pendidikan mental, rasionalitas, martabat, etika dan estetika dapat ditanamkan. Namun, sistem desentralisasi pendidikan ini belum segala-galanya apabila tidak diikuti usaha-usaha perbaikan diberbagai bidang (Tilaar,1998), karena pendidikan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang timbul akibat proses globalisasi, dan adanya krisis multi dimensi yang berakibat pada perubahan perencanaan, kebijakan, manajemen, dan lain-lain.

Sebagaimana dipahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah (pendidikan) telah memiliki dasar yang kuat. Beberapa aturan yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi tersebut antara lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD 1999), Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, dan banyak lagi peraturan pemerintah lainnya.

Menurut Tilaar (1998: 83), konsep munculnya otonomi daerah (pendidikan) didasarkan pada pola pemikiran yang sangat baik, yaitu untuk menumbuhkembangkan inisiatif dan kreatifitas ditingkat daerah dan sekolah. Pemerintah daerah berani mengatasi kekurangan guru, sekolah memiliki inisiatif untuk meningkatkan mutu guru, daerah memiliki anggaran yang memadai untuk pengadaan buku, daerah berani meningkatkan kesejahteraan guru, dan masih banyak pemikiran yang mendasari munculnya otonomi daerah (sekolah). Namun satu hal yang perlu dipahami bahwa untuk membuat kebijakan yang selaras dengan kearifan lokal bukan merupakan hal yang mudah dilakukan. Sekolah dan daerah sangat memerlukan tenaga ahli yang sesuai untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan sekolah (daerah). Selama ini sumber daya manusia yang ada sudah terbiasa melakukan kegiatan yang bersifat rutin.

Selaras dengan permasalahan diatas, Baedhowi (2010) menyatakan bahwa perlu ada semacam pemaparan komprehensif untuk menjelaskan konsep dasar dan implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan. Konsep tentang perlunya kebijakan otonomi pendidikan, dipandang perlu karena daerah lebih *accountable* dan efektif dalam mengelola pendidikan. Berbeda jauh dibanding masa sentralisasi pendidikan, dengan birokrasi berbelit dan panjang. Sehingga menurut Slamet PH (2004: 312), keuntungan fundamental memakai sistem desentralisasi yaitu, jika keputusan berangkat dari daerah, keuntungannya daerah lebih mengetahui persoalan pendidikan di wilayahnya, ketimbang pusat.

Satu hal yang harus diakui, bahwa di provinsi Maluku Utara dengan berbagai macam sukunya, pemberlakuan desentralisasi pendidikan akan terwujud sebuah sistem manajemen sekolah yang benar-benar menekankan pada implementasi kebhinnekaan. Menurut Hamijoyo (1999: 3), terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu (1) pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis; (2) pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama; (3) peranserta masyarakat bukan hanya pada *stakeholders*, tetapi harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan; (4) pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak; dan (5) keanekaragaman aspirasi dan nilai serta norma lokal harus dihargai dalam kerangka nasional.



Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa permasalahan yang dihadapi setiap sekolah di provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan otonomi pendidikan diantaranya berupa (1) kebijakan yang dibuat oleh sekolah dihadapkan pada kondisi faktual yang harus segera direspon, (2) sekolah harus mengelola sendiri sumber daya yang diperlukan (mencari dan memanfaatkannya), (3) masing-masing sekolah harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, (4) sekolah perlu memiliki kecerdasan yang memadai untuk dapat menerapkan kurikulum yang benar-benar menjawab kebutuhan, (5) penyelenggaraan sekolah harus berbasis budaya lokal dimana sekolah itu berada, dan (6) sekolah harus benar-benar memiliki kecerdasan berwirausaha dan berjiwa inovatif untuk mampu mengembangkan sekolah (satuan pendidikan).

## **E. PEMBAHASAN**

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama, yaitu orang tua/masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Artinya bahwa penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tanggungjawab keluarga saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama-sama, sesuai dengan tingkat kepentingannya. Terutama untuk tingkat pendidikan dasar, pada hakekatnya lebih menjadi tanggungjawab pemerintah, karena menurut Rahmat Wahab (2011) pendidikan dasar merupakan *public goods*. Sedangkan pendidikan menengah ke atas dapat diklaim sebagai tanggungjawab bersama, bahkan masyarakat harus menopangnya, karena pendidikan menengah ke atas merupakan *private goods*. Sungguh disayangkan, bahwa pendidikan dasar belum sepenuhnya menjadi *public goods*, karena terbukti, pemerintah belum secara total mampu mengupayakan semua peserta didik pendidikan dasar terbebas dari biaya pendidikan. Apalagi untuk memenuhi tingkat kualitas tertentu. Padahal membangun pendidikan yang berkualitas secara keseluruhan harus bermula dari terbangunnya pendidikan dasar yang benar-benar berkualitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di sebagian wilayah di provinsi Maluku Utara selama ini biaya pendidikan lebih banyak ditopang oleh keluarga dan masyarakat. Padahal yang seharusnya menjadi *stakeholders* pendidikan juga para dunia industri dan bisnis. Oleh karena itulah dunia industri dan bisnis merupakan potensi besar dalam pendanaan pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Namun pada kenyataannya masih perlu kerja keras dalam menentukan pembagian dana secara adil dengan mempertimbangkan beberapa kondisi dan latar belakang.

Berdasarkan UUD 1945 dan UU Sisdiknas, anggaran pendidikan untuk operasional pendidikan seharusnya sekitar 20% APBN dan APBD masing-masing daerah. Angka ini secara politis sangatlah berarti, karena selama ini anggaran pendidikan tidak pernah melebihi dari 5% dari APBN dan APBD. Menurut hemat peneliti, angka 20% belum menunjukkan solusi yang efektif, karena TUPOKSI

antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota berbeda. Supaya lebih fair, sesuai temuan dalam penelitian ini, anggaran pendidikan untuk pemerintah kabupaten/kota khususnya di provinsi Maluku Utara seharusnya lebih dari 20% dari APBD-nya, demikian pula anggaran pendidikan untuk pemerintah daerah propinsi bisa lebih kurang dari 20%-nya. Selain daripada itu secara akademik pada dasarnya penentuan anggaran pendidikan seharusnya tidak menggunakan ukuran yang dibandingkan dengan APBN, namun yang lebih efektif, berapa unit cost setiap unit pendidikan untuk ukuran kualitas tertentu. Oleh karena itu ukuran prosentase anggaran jika dibandingkan dengan APBN, seharusnya bersifat fluktuatif tergantung pada kebutuhan untuk mencapai tingkat kualitas yang diinginkan.

Temuan dalam penelitian ini juga, menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama sebagai pendorong kemajuan pendidikan yaitu berupa teknologi informasi, uang, dan manajemen. Oleh karena itu, persyaratan mutlak untuk dapat memenangkan persaingan global termasuk bidang pendidikan haruslah memiliki kemampuan yang lebih unggul dalam menguasai informasi, memiliki kemampuan keuangan yang memadai, dan manajemen pengelolaan yang memiliki daya saing tinggi. Bagaimana kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu daerah dalam mencari dan memanfaatkan informasi akan sangat menentukan sampai dimana informasi global tersebut dapat dikuasai. Kenyataan demikian sangat memerlukan kecerdasan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Faktor lain sebagai pendorong percepatan globalisasi dalam segala aspek yaitu berupa uang. Pada tahap awal, persoalan uang bukanlah pada berapa besar jumlah uang yang harus dimiliki, akan tetapi lebih fokus pada bagaimana kecerdasan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Jumlah uang yang banyak di setiap sekolah belum bisa dijadikan jaminan untuk memenangkan persaingan, akan tetapi kecerdasan dalam mengelola keuanganlah yang akan menjadi faktor utama dalam memenangkan kompetisi. Kecerdasan keuangan yang dimiliki akan mampu mendatangkan penghasilan luar biasa sehingga mampu memperbaiki sekolah pada khususnya dan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya.

Untuk wilayah Maluku Utara, pada umumnya terdiri atas daerah-daerah yang masih tergolong rendah dalam segala aspek, khususnya dalam kecerdasan teknologi informasi, kecerdasan keuangan, dan kecerdasan manajemen. Hal ini merupakan titik lemah bagi setiap unit otonom yang harus menghadapi globalisasi yang telah hampir mengesampingkan jati diri. Berdasarkan pengamatan penulis, dapat dinyatakan bahwa provinsi-provinsi lain telah mulai melaksanakan globalisasi tetapi untuk masyarakat Maluku Utara pada umumnya masih ketakutan dengan istilah globalisasi. Hal ini diakibatkan oleh ketidakkonsistenan dalam mempertahankan kearifan lokal sehingga menjadi tidak jelas ke arah mana akan bergerak.

Disadari atau tidak perkembangan pendidikan di Maluku Utara tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

pesat dan terjadi secara global. Adanya era pasar bebas merupakan tantangan bagi dunia pendidikan, hal ini memberikan peluang bagi lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari luar Maluku Utara untuk masuk ke daerah ini. Dalam menghadapi pasar global, kebijakan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan, baik secara akademik maupun non-akademik. Kebijakan yang ditetapkan harus mampu memperbaiki manajemen pendidikan sehingga menjadi lebih produktif dan efisien serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah yang notabene sebagai pengemban amanat rakyat, dapat bergerak cepat menemukan dan memperbaiki celah-celah yang dapat menyulut gejolak tersebut. Salah satunya dengan cara menjadikan pendidikan semakin murah tapi bukan murahan tanpa kualitas. Hal ini memang sudah dimulai di beberapa kabupaten di Maluku Utara yang menyediakan sekolah unggulan. Alangkah baik jika pemerintah pusat menerapkan kebijakan tersebut dalam skala nasional. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut pemerintah perlu melakukan pembenahan terutama dalam bidang birokrasi. Korupsi mesti segera dituntaskan, karena korupsi merupakan salah satu yang menghancurkan bangsa ini. Dengan menekan angka korupsi di Indonesia yang masuk jajaran raksasa korupsi dunia, diharapkan dapat memperbesar alokasi dana untuk pendidikan. Globalisasi dalam dunia pendidikan saat ini memang diperlukan untuk menghadapi tantangan global. Namun demikian globalisasi pendidikan hendaknya tidak meninggalkan masyarakat kita yang masih termasuk golongan lemah agar kemajuan bangsa dan daerah ini dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Maluku Utara khususnya.

## **F. PENUTUP**

Biaya pendidikan sangat bervariasi, tidak hanya antar negara, tetapi di negara yang sama, antara pendidikan formal dan non formal, antara tingkat, jenis dan ukuran lembaga yang berbeda, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan bahkan dalam beberapa lembaga, antara bagian yang berbeda dari kurikulum dan berbagai tempat dan waktu. Meskipun ini cakupannya mulai dari perbedaan biaya, pola perilaku mereka sering sangat mirip di hampir semua sistem pendidikan. Ini bukan hanya karena pengaruh prinsip ekonomi tertentu yang universal, tetapi karena sistem pendidikan di seluruh dunia didasarkan pada struktur, teknologi, logistik, dan tempat yang sama. Faktor-faktor ini memiliki pengaruh besar pada biaya pendidikan, begitu banyak sehingga untuk mencapai perubahan besar dalam perilaku biaya kemungkinan akan membutuhkan beberapa praktek tradisional, keyakinan, dan sikap yang bersifat tradisional.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa, gaji guru, administrator, dan tenaga kependidikan lainnya mendominasi keseluruhan biaya pendidikan. Dominasi ini mencerminkan karakter padat karya berubah ke teknologi pendidikan, yang berbeda dengan sebagian besar industri modern.

Negara-negara berkembang pada umumnya menghabiskan biaya yang lebih banyak dari anggaran pendidikan untuk gaji dari negara yang lebih maju. Lebih dari 90 persen di sekolah dasar bila dibandingkan dengan di sekolah lanjutan. Di sekolah lanjutan tidak hanya memiliki anggaran yang sedikit, tetapi malah ada tekanan yang kuat untuk guru, dan gaji guru juga harus lebih tinggi. Dalam kondisi saat ini anggaran semakin ketat. Para penentu kebijakan dibidang pendidikan di banyak negara telah menemukan jalan lebih mudah untuk menghemat biaya non gaji, dalam beberapa kasus, menghilangkan alokasi anggaran untuk buku teks, persediaan, dan pemeliharaan. Efek dari kebijakan ini justru merusak keseimbangan input yang diinginkan, sehingga dapat menurunkan produktivitas guru dan siswa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan mutu pendidikan secara merata di provinsi Maluku Utara, maka harus menjadikan pendidikan sebagai subjek yang mencakup semua anak bangsa tanpa dikecualikan oleh potensi, karakteristik, jenis kelamin, ras, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Secara jujur untuk merealisasikannya yang ideal tidaklah mudah. Untuk itulah dibutuhkan suatu pengorbanan yang tulus dari semua pihak, terutama orangtua, guru, sekolah, dunia industri dan bisnis.
2. Ketenagaan dalam melayani anak didik di semua jenjang dan jenis pendidikan apapun dibutuhkan tenaga yang handal dan profesional. Karena tidak sedikit ditemukan di lapangan, bahwa secara kuantitatif sudah tersedia tenaga guru secara memadai, namun secara kualitatif kondisi dan kinerja tenaga guru masih belum banyak yang memenuhi kriteria kompetensi minimal. Karena itu pembuatan program pembinaan perlu terus diupayakan.
3. Untuk memenangkan persaingan global, pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan secara otonomi perlu mendapat perhatian secara serius oleh berbagai pihak.
4. Untuk dapat memenangkan persaingan global, maka spirit otonomi perlu menselaraskan dengan spirit globalisasi.
5. Harus ada keberpihakan secara tegas dan nyata dari pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Maluku Utara terhadap pendidikan, jika kita menginginkan sebuah kemajuan hakiki
6. Setiap satuan pendidikan harus diberi kewenangan seluas-luasnya untuk menentukan arah dan kebijakan sekolahnya sendiri terhadap perkembangan, tapi bukan berarti sama sekali lepas kontrol dari pemerintah

7. Setiap kabupaten/kota harus mempunyai ciri khas keunggulan (kearifan lokal) untuk dibekalkan kepada siswa, setidaknya dimasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal.

## **SARAN**

1. Kepada penyelenggara pendidikan atau pengelola sekolah, antara lain dewan pendidikan, komite sekolah, masyarakat dan orang tua harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara proporsional dan profesional agar proses belajar mengajar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, sesuai dengan visi, misi dan tujuannya.
2. Pihak sekolah harus memahami bahwa mereka hanya sebagai penyelenggara pendidikan, dan sekolah itu pada hakikatnya adalah milik masyarakat (*school ownership*), untuk itu diharapkan pihak sekolah dapat mensosialisasikan konsep ini kepada masyarakat luas.
3. Masyarakat dapat memantau berbagai kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pihak sekolah termasuk penetapan biaya pendidikan melalui Komite Sekolah. Oleh karena itu, masyarakat (orang tua) diharapkan dapat menilai dan menanggapi berbagai kebijakan yang dibuat oleh sekolah secara proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, I. (1991). Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan. *Mimbar Pendidikan*, No. 1 Tahun X, 1991: 28—33.
- Baedhowi. (2007). Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi. (Online). <http://www.penapendidikan.com/mengupasotonomi-pendidikan.html>. Diakses tanggal 12 Juni 2012.
- Fattah, N. (2002). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Penerbit Rosdakarya.
- (2004). *Landasan manajemen pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Gaffar, M. F. (1991). Konsep dan Filosofi Biaya Pendidikan Pendidikan. *Mimbar Pendidikan*, Nomor 1 Tahun X, 1991: 56—60.
- Gaffar, Mohammad Fakry. (2004). Membangun Kembali Pendidikan Nasional dengan Fokus: Pembaharuan Manajemen Perguruan Tinggi pada Era Globalisasi. Disampaikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia V, di Surabaya, 5—9 Oktober 2004.
- Hamijoyo, Santoso S. (1999). Pola Otonomi Daerah yang Efektif dan Efisien untuk Diimplementasikan dalam Bidang Pendidikan. Malang. FIP UM.
- Januar, Indra. (2006). Globalisasi Pendidikan Di Indonesia. (Online). [http://zag.7p.com/globalisasi\\_pendidikan.htm](http://zag.7p.com/globalisasi_pendidikan.htm), diakses tanggal 14 Juni 2012.
- Latchanna, G., dan Hussein, J. O. (2007). *Economics of Education*. New Delhi: Discovery Publishing House.
- Levin, M. H. and Hans, G. S. (1987). *Financing Recurrent Educational*. Beverly Hills California: Sage Publication Inc.
- Loxley, W. (2008). *Financing Education: Perspectives of The Asian Development Bank*. (Online). (<http://www.adb.org/Education/financing-edu.pdf>, diakses 29 Juli 2012).
- Suharsimi Arikunto. (2007). *MPMBS menuju sekolah efektif*. Makalah, tidak diterbitkan, di berikan pada kuliah pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan UNY.
- Supriyadi, D. (2006). Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi dan Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suroso, Jarot S. (2010). Pendidikan Nasional di Indonesia. (Siapkah Menghadapi Globalisasi?). (Online). <http://www.scribd.com/doc/6480664/Globalisasi-Pendidikan>, diakses tanggal 14 Juni 2012.
- Suryadi, A. (2003). *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah: Mewujudkan Sekolah-sekolah yang Mandiri dan Otonom*. Makalah disampaikan pada Sosialisasi Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Malang tanggal 16 Juni 2003.

- Sutjipto, (2004). *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Masalah dan Tantangannya*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Indonesia di Hotel Bela Internasional, Ternate, 21—23 Mei 2012.
- Suyanto. (2001). *Kepemimpinan kepala sekolah*. diakses pada tanggal 12 januari 2007, dari [www. Kompas. Com](http://www.kompas.com).
- Tanje, Sixtus. (2008). *Globalisasi Pendidikan dan Ketidaksiapan Sekolah*. (Online). <http://re-searchengines.com/sixtus0409.html>, diakses tanggal 14 Desember 2012.
- Thomas, J.A. (1971). *The Productive School: A System Analysis Approach to Educational Administration*. New York: John Wiley and Sons.
- Tilaar, H.A.R. (1998). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wicaksono, Rohadi. (2008). *Dunia Pendidikan Di Era Global*. Disampaikan pada acara *Talk Show* yang diadakan oleh Akademi Analis Farmasi dan Makanan Putra Indonesia Malang, pada tanggal 9 Agustus 2008. (Online). <http://www.scribd.com/doc/4643968/Dunia-Pendidikan-Di-Era-Global>, diakses tanggal 14 Oktober 2012.
- Woodhall, M. 2004. *Cost Benefit Analysis in Educational Planning*. Fourth edition. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.